



BPK Desak Pemkab Tuntaskan Masalah Aset

■ Pengaruhi Pemberian Opini

PONTIANAK, TRIBUN - Kepala Sub Auditoral BPK RI Patrice L menilai, secara umum aset di Kalbar belum jelas. Saat dilaporkan, aset tersebut tak jelas lokasi, jumlah dan luasnya.

"Inilah yang menjadi kesulitan buat kami. Sementara, kita berharap keberadaan aset yang dilaporkan itu jelas dan lengkap. Kalau tidak dilaporkan secara jelas, akan mempengaruhi kita dalam memberikan opini," ujar Patrice kepada wartawan usai mem-

berikan materi dalam media workshop yang digelar BPK RI Perwakilan Kalbar di Hotel Marcure Pontianak, Jl A Yani Pontianak, Selasa (4/11).

Patrice menjelaskan, rata-rata masalah aset di Kalbar berkaitan dengan hubungan pemekaran daerah kabupaten induk dengan kabupaten yang baru.

"Kabupaten yang lambat dalam menangani masalah aset, seperti pemekaran Kota Singkawang dengan Sambas. Hingga sekarang, permasalahan aset kedua wilayah tersebut

belum selesai," tuturnya. Kepala Sub Auditoral BPK Kalbar II BPK RI Perwakilan Kalbar Joni Rindra Putra menambahkan, secara presentasi terkait penanganan masalah aset di daerah pemekaran tidak lagi terlampaui banyak.

"Keterlambatan penanganan aset di daerah pemekaran seperti Singkawang, Sambas dan Mempawah. Dimana sudah dibicarakan kawan-kawan DPRD. Mudah-mudah dalam waktu dekat ini, masalah aset

■ **Bersambung ke Hal. 15**

BPK Desak Pemkab Tuntaskan Masalah Aset

bisa diselesaikan dengan baik," katanya.

Joni mengatakan, pihaknya mengajukan agar masalah aset ini segera diselesaikan. Jika tidak, akan mempengaruhi

terlalu material lagi," ucapnya. Sedangkan untuk di Kubu Raya dengan Mempawah sudah hampir selesai. Joni berharap, hasil pemeriksaan BPK pada 2015 bisa diselesaikan

Sambungan Hal. 9

dengan cepat.

"Itupun tergantung pihak Kubu Raya sendiri. Sebab kita sudah memberikan arahan apa yang harus mereka dilakukan," ungkapnya. (rul)